

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Era globalisasi saat ini pertumbuhan dan persaingan badan usaha semakin meningkat, sehingga perusahaan harus mencari metode pengendalian agar usaha yang dijalankan dapat berkembang. Pengendalian terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan mengurangi biaya-biaya yang tidak efektif dalam kegiatannya. Perusahaan perlu menerapkan akuntansi pertanggungjawaban guna menunjang pengendalian biaya. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan pengendalian biaya dalam perusahaan bermanfaat untuk mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban untuk mengendalikan tanggungjawab tiap unit kerja atau departemen yang disebut pusat pertanggungjawaban.

Kejadian munculnya COVID-19 atau disebut pandemi corona virus membawa dampak yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Selain menurunnya jumlah produksi, sebagian karyawan diberi libur secara bergantian atau di rumahkan sepenuhnya dengan separuh pesangon atau tanpa pesangon sama sekali. Hal ini dapat berpengaruh terhadap tujuan perusahaan yang ingin dicapai.

Akuntansi pertanggungjawaban adalah tindakan yang diambil oleh manajer guna memastikan bahwa hasil aktual sejalan dengan hasil yang direncanakan, untuk mengendalikan sebuah perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan metode yang paling banyak digunakan

karena dengan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan suatu organisasi untuk merekam seluruh aktivitasnya kemudian mengetahui bagian/unit yang bertanggung jawab atas aktifitas tersebut, dan menentukan bagian/unit mana yang tidak berjalan secara efektif dan efisien..

Agar dapat bertahan dan bersaing dalam dunia ekonomi yang semakin kompetitif, strategi manajemen yang mutlak sangat dibutuhkan. Manajemen berupaya untuk melakukan pengendalian terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan, dan mengurangi biaya-biaya yang tidak efektif dalam kegiatannya. Dan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut diperlukan perencanaan dan pengendalian biaya secara efektif. Pengendalian biaya ini penting untuk menekan biaya-biaya yang seharusnya bisa dihindarkan dan tidak perlu terjadi, dengan demikian perusahaan dapat lebih bekerja secara efisien. Salah satu alat pengendalian yang dipergunakan oleh manajemen dalam mengendalikan biaya adalah sistem akuntansi pertanggungjawaban.

Dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban, pimpinan dapat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab ke tingkat pimpinan di bawahnya dengan lebih efisien tanpa memantau secara langsung seluruh kegiatan perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban juga perlu dievaluasi agar berlangsung dengan baik sehingga manajemen dapat dengan mudah menghubungkan biaya yang timbul dengan manajer pusat pertanggungjawaban yang bertanggung jawab. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang memadai mampu mendorong perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan.

Secara logis dalam kondisi perusahaan berkembang, manajemen puncak biasanya menciptakan berbagai wilayah tanggung jawab yang dikenal sebagai pusat pertanggungjawaban dan menugaskan manajer dibawahnya untuk menangani wilayah tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban berjalan dengan baik untuk semua jenis organisasi terdesentralisasi, terlepas dari apakah segmen bisnisnya didasarkan pada fungsi, produk, pelanggan, atau wilayah geografis. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban memerlukan syarat atau kriteria tertentu agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan

Penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi perusahaan dapat membantu perusahaan dalam menyediakan data dan informasi yang cepat, akurat, dan berdaya guna merupakan sarana bagi pihak manajemen dalam mengelola perusahaan dan juga sebagai pelaporan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari jurnal penelitian terdahulu dengan topik akuntansi pertanggungjawaban oleh Rabin P. Ramadhan, dkk(2021) menemukan bahwa PT. Delta Pasific Indotuna Bitung belum memenuhi syarat karena belum adanya pemisahan biaya antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali yang disebabkan oleh karena perusahaan belum merealisasikan laporan pertanggungjawaban biaya bagi setiap pusat pertanggungjawaban serta belum adanya penjelasan tentang penyebab-penyebab terjadinya selisih antara biaya yang dianggarkan dengan realisasi biaya tersebut. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah belum efektifnya penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan tersebut. Kemudian penelitian yang

dilakukan oleh Ni Kadek Herlinda Ayu Wandari, dkk (2021) menemukan bahwa RSUD Kab Buleleng sudah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian dengan baik dan sesuai dengan aturan. Terdapat proses penyusunan anggaran rencana kegiatan rumah sakit selama satu tahun, adanya pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali, adanya klasifikasi kode rekening, serta sistem pelaporan sebagai syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Dan penelitian yang dilakukan oleh Erika Sharon, dkk (2021) menemukan bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara telah memenuhi kelima syarat akuntansi pertanggungjawaban dan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban dengan baik karena sudah menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban dengan baik sehingga pengendalian biaya juga telah dilakukan dengan baik dan efisien.

Dari beberapa jurnal penelitian yang ada penulis akan mengevaluasi tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Marihat Dalu-dalu. Karena Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Marihat Dalu-dalu merupakan gabungan perusahaan-perusahaan Belanda yang diambil alih Negara menjadi Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) yang memiliki bagian penelitian. Biaya-biaya yang dianggarkan haruslah dialokasikan dan dihitung dengan baik. Tuntutan untuk melakukan kegiatan operasional secara efisien dan efektif semakin besar sehingga perlu ada pengawasan dan pengelolaan atas berbagai biaya operasional serta investasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Untuk mengendalikan biaya produksi maka diterapkan akuntansi pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menjadi alat ukur dalam menjalankan proses biaya-biaya. Sebagai lembaga penelitian yang memiliki kewajiban dalam memajukan industri kelapa sawit di Indonesia, PPKS memiliki tujuan menjadi lembaga penelitian bertaraf internasional yang mampu menjadi acuan (*center of excellence*) bagi perkelapa sawitan nasional, yang dalam kegiatannya mampu mandiri secara finansial dan memiliki sumberdaya insani yang berkualitas dan sejahtera.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, menyatakan bahwa belum semua perusahaan yang telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya maupun penilaian kinerja manajemennya, telah mencapai hasil yang lebih efektif, dan dari beberapa hasil penelitian terdahulu di atas menggunakan metode deskriptif komparatif dengan cara membandingkan anggaran dan realisasinya yang ada dalam laporan pertanggungjawaban. Melihat hal ini, penulis ingin melakukan penelitian tentang **“EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA PADA PUSAT PENELITIAN KELAPA SAWIT (PPKS) MARIHAT DALU DALU”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalahnya yaitu :
“Bagaimana Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat

Evaluasi Efisiensi Pengendalian biaya pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) MARIHAT DALU DALU?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuannya untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban, mengevaluasi efisiensi pengendalian biaya, dan mengetahui peranan akuntansi pertanggungjawaban dalam menunjang efisiensi pengendalian biaya pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) MARIHAT DALU-DALU.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis.

Dapat menerapkan teori dari berbagai sumber ilmu yang didapat saat bangku perkuliahan, dan dapat menambah wawasan dan pengalaman penulis, serta sebagai syarat kelulusan kuliah yaitu Skripsi Penelitian.

2. Bagi akademisi.

Di harapkan dapat memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan tentang teori-teori dan konsep yang diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara nyata dalam perusahaan, khususnya terkait dengan penerapan akuntansi pertanggungjawaban

3. Bagi perusahaan.

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak manajer perusahaan dalam menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dengan sebagai alat pengendalian biaya.

4. Bagi pihak lain, khususnya dikalangan perguruan tinggi.

Hasil penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan sebagai gambaran praktek dilapangan dan menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

1.5. Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan serta untuk menghindari ketidakjelasan dalam permasalahan, penulis membatasi masalah pada bidang akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Marihat Dalu-dalu. Semua itu dilakukan agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan penelian.

1.5.2. Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Rabin P. Ramadhan, Jullie Sondakh dan Syermi Mintalangi (2021) dengan judul “Evaluasi Penerapan Akuntansi Peratanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PT. Delta Pasific Indotuna Bitung” hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban yang ada pada PT Delta Pasific Indotuna

belum sepenuhnya sesuai. Hal ini dikarenakan struktur yang dibuat masih terdapat pembagian tugas yang sama untuk departemen yang berbeda, perusahaan juga belum menggolongkan biaya dari biaya terkendali dan biaya tidak terkendali pada laporan realisasi anggaran. Bentuk laporan yang disajikan juga masih kurang memadai karena tidak ada informasi terkait nilai anggaran dan realisasi dari aktiva serta pendapatan, laporan yang disajikan berisi biaya saja. Pengendalian biaya yang dilakukan oleh PT Delta Pasific Indotuna belum sepenuhnya berjalan efisien. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah (1) objek penelitian sebelumnya pada PT Delta Pasific Indotuna Bitung, sedangkan objek penelitian ini pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Marihat Dalu-dalu.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, originalitas, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAU PUSTAKA

Menjelaskan tentang landasan teori penelitian dan pembahasan penelitian sebelumnya yang sejenis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis yang digunakan, dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian beserta pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan beserta saran mengenai penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.3. Deskripsi Teori

2.3.1. Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban

Akuntansi sangat erat hubungannya dengan kejadian, karna akuntansi tersebut memberikan informasi mengenai keuangan suatu usaha dan bahkan informasi keuangan secara individu. Akuntansi merupakan pencatatan keuangan kepada yang berkepentingan dalam suatu organisasi.

Ada beberapa pendapat mengenai definisi akuntansi pertanggung jawaban menurut para ahli, diantaranya yaitu :

Menurut Mulyadi (2017) akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka

Menurut Bambang Suropto (2017) Akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan dan/atau biaya yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas tersebut.

Menurut Hansen dan Mowen (2012) mengatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban sehingga informasi yang dibutuhkan oleh para manajer bahwa akuntansi pertanggungjawaban juga digunakan untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban. Dalam akuntansi

pertanggungjawaban memiliki empat elemen penting, yaitu pembebanan tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja (benchmarking), pengevaluasian kinerja, dan pemberian penghargaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang memuat rencana dan realisasi pusat pertanggungjawaban serta sarana untuk menilai prestasi atau kinerja dari pusat-pusat pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.

2.3.2. Pengertian Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban

Menurut Mulyadi (2017) Sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat dikelompokkan menjadi 2 : sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional dan sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis aktivitas. Perbedaan kedua macam sistem akuntansi pertanggungjawaban tersebut didasarkan atas perbedaan fokus objek yang dikendalikan.

Sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional memfokuskan pengendaliannya terhadap biaya dengan cara menghubungkan biaya dengan manajer yang memiliki wewenang atas terjadinya biaya. Sedangkan sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis aktivitas memfokuskan pengendalian terhadap aktivitas yang menyebabkan terjadinya biaya dengan cara menghubungkan biaya dengan aktivitas penambah dan bukan penambah nilai, sehingga manajemen dapat merencanakan program pengelolaan aktivitas dan memantau dampak program tersebut terhadap pengurangan biaya.

Menurut Mulyadi (2017) ada lima kondisi untuk dapat menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban dalam suatu organisasi sebagai berikut:

1. Organisasi yang terdiri atas pusat-pusat pertanggungjawaban dan dapat disentralisasi wewenang didalamnya.
2. Anggaran biaya yang disusun menurut pusat-pusat pertanggungjawaban.
3. Pengolongan biaya yang sesuai dan dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan oleh pusat pertanggungjawaban.
4. Sistem akuntansi yang sesuai dengan pusat pertanggungjawaban.
5. Sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggungjawab.

2.3.3. Syarat-syarat Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban

Syarat untuk menerapkan akuntansi pertanggungjawaban Menurut Mulyadi (2017) adalah:

1. Struktur organisasi (*Organization Structure*)

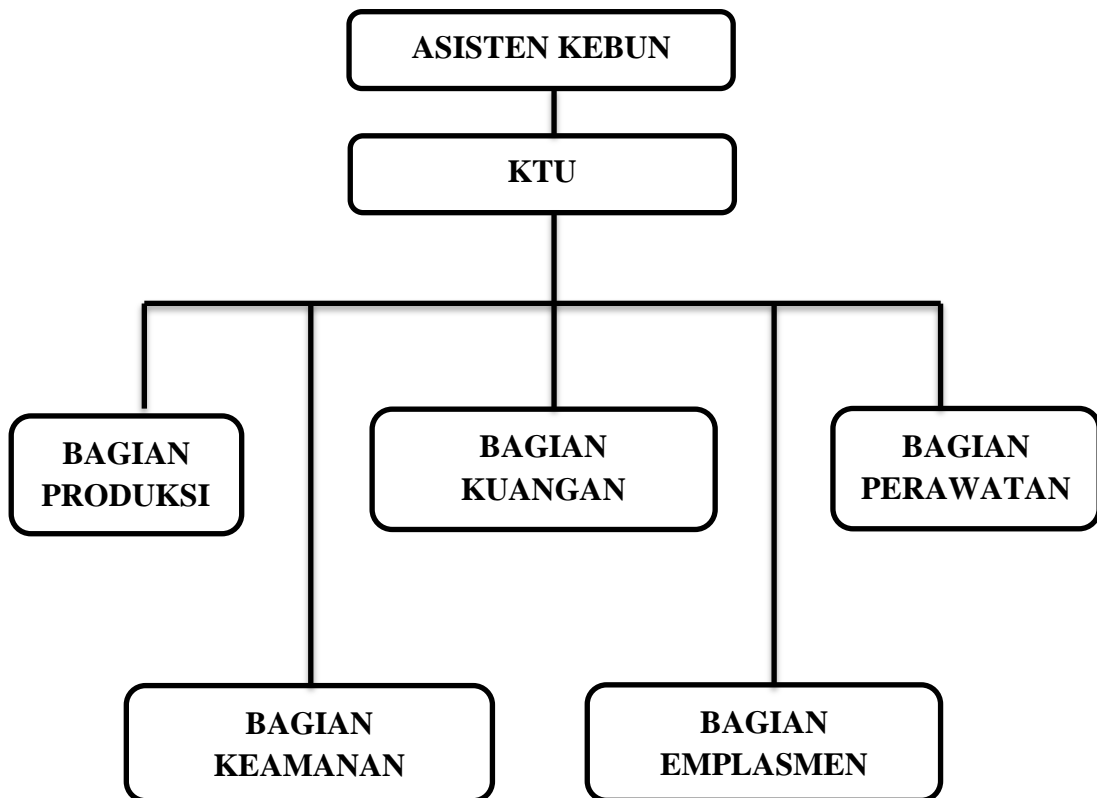
Dalam akuntansi pertanggungjawaban struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggung jawab, wewenang dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen selain itu harus menggambarkan pembagian tugas dengan jelas pula. Dimana organisasi disusun sedemikian rupa sehingga wewenang dan tanggung jawab tiap pimpinan jelas. Dengan demikian wewenang mengalir dari tingkat manajemen atas ke bawah, sedangkan tanggung jawab adalah sebaliknya.

Struktur organisasi berguna dalam pengendalian aktivitas di dalam perusahaan. struktur organisasi menjadi ciri khas suatu perusahaan yang

menjelaskan secara rinci mengenai pembagian tugas dan wewenang setiap manajer dan karyawan sehingga dapat mengendalikan, mengarahkan, dan mengatur orang-orang didalamnya agar aktivitas operasional dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan perusahaan.

Gambar 2.1.

Contoh Format struktur organisasi pada perusahaan unit kelapa sawit.



Sumber : Mulyadi (2017 : 194)

2. Anggaran biaya (*Budget*)

Anggaran merupakan gambaran rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh para manajer dan sebagai dasar dalam penilaian kinerja manajer. Anggaran digunakan untuk dua tujuan, yakni perencanaan dan pengendalian. Perencanaan (*planning*) meliputi perumusan tujuan dan dan

penyusunan berbagai anggaran untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan pengendalian (*control*) meliputi pengumpulan umpan balik untuk memastikan rencana telah dijalankan secara tepat atau dimodifikasikan bila ada perubahan keadaan.

Dalam akuntansi pertanggungjawaban setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kerjanya. Diikuti sertakannya semua manajer dalam penyusunan anggaran.

Beberapa manfaatnya sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan alat komunikasi bagi rencana manajemen kepada seluruh organisasi.
2. Anggaran memaksa manajer untuk memikirkan dan merencanakan masa depan.
3. Proses penganggaran merupakan alat alokasi sumber daya pada berbagai bagian dari organisasi agar dapat digunakan seefektif mungkin.
4. Proses penganggaran dapat mengungkapkan adanya potensi masalah sebelum masalah itu terjadi.
5. Anggaran menentukan tujuan dan sasaran yang dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi kinerja selanjutnya.

Anggaran yang disusun dengan baik akan mendukung suksesnya penerapan rencana bisnis. Anggaran yang baik tentunya juga akan

memperbaiki komunikasi manajerial dan memberikan pengertian yang lebih baik kepada karyawan mengenai tujuan dan operasional perusahaan. anggaran berfungsi sebagai pegangan dalam pengambilan keputusan dan membantu dalam proses menentukan standar kinerja perusahaan.

Dengan adanya evaluasi anggaran dapat diketahui seberapa jauh proses keberhasilan pelaksanaan anggaran didalam pekerjaan, seberapa jauh penyimpangan atas kesalahan yang terjadi. Bila terjadi beberapa kesalahan maka dapat diambil tindakan koreksi yang perlu untuk mengatasinya. Dengan demikian anggaran dapat digunakan sebagai dasar rencana untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dimasa yang akan datang.

Gambar 2.2.

Contoh Format umum anggaran biaya.

Bagian/Departemen/Direktur Rencana Biaya Bulan		
Uraian	Anggaran	Realisasi
Biaya Pegawai	50.355.348.247	48.987.768.702

Sumber : Mulyadi (2017 : 193)

3. Penggolongan biaya (*Cost Clasification*)

Pemisahan biaya kedalam biaya dapat dikendalikan dan biaya tidak dapat dikendalikan menjadi syarat diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban. Biaya terkendali adalah biaya yang secara langsung dapat dikendalikan atau dipengaruhi oleh manajer dalam jangka waktu tertentu. Adapun biaya tidak terkendali adalah biaya yang tidak dapat

dikendalikan oleh manajer sehingga biaya ini diabaikan dalam proses pertanggungjawaban manajer.

Pemisahan biaya kedalam biaya-biaya yang dapat dikendalikan dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan pada dasarnya adalah sulit. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman yang dapat dipakai sebagai acuan apakah biaya tersebut dibebankan kepada seseorang atau tidak, antara lain:

1. Jika seorang memiliki wewenang, baik dalam pemerolehan maupun penggunaan jasa, ia harus dibebani dengan biaya tersebut. Manajer yang mempunyai wewenang yang memutuskan media promosi dan jumlah biayanya akan bertanggungjawab penuh terhadap terjadinya biaya tersebut.
2. Jika seorang manajer dapat secara signifikan mempengaruhi jumlah biaya tertentu melalui tindakannya sendiri ia dapat dibebani dengan biaya tersebut. Meskipun ia tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan pemerolehan barang dan jasa, baik harga maupun jumlahnya, namun dapat secara signifikan mempengaruhi jumlah pemakainya.

Karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian dapat dikendalikan oleh manajer, maka hanya biaya-biaya terkendalikan yang harus dipertanggungjawabkan olehnya. Pemisahan biaya kedalam biaya terkendalikan dan biaya tak terkendalikan perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban.

Gambar 2.3.

Contoh Format Laporan Pertanggungjawaban biaya tingkat terbawah

**Bagian/Departemen/Direktur
Rencana Biaya Bulan**

Kode	Jenis Biaya/	Bulan ini	Sampai Dengan Bulan ini
Rek.	Pusat Biaya	Realisasi Anggaran	Penyimpangan Realisasi Anggaran Penyimpangan

Biaya Terkendalikan :

- 111 Biaya Merang
- 112 Biaya Bahan Serat
- 113 Biaya Pulp
- 114 Biaya Kertas
- 115 Biaya Bahan Penolong
- 116 Biaya Bahan Bakar
- 117 Biaya Bahan Pelumas
- 119 Biaya Gaji dan Upah
- 211 Biaya Bahan Lain-lain
- 212 Biaya Gaji dan Upah
- 213 Biaya Pengobatan

Biaya Tidak Terkendalikan :

- 312 Biaya Reparasi dan Pemeliharaan Gedung
- 313 Biaya Reparasi dan Pemeliharaan Mesin dan Ekuipmen
- 411 Biaya Depresiasi Emplasmen
- 412 Biaya Depresiasi Gedung
- 415 Biaya Depresiasi Aktiva Tetap dan Lain-lain
- 416 Biaya Amortisasi Aktiva Tidak Berwujud
- 511 Biaya Asuransi Aktiva Tetap
- 512 Biaya Asuransi Sediaan

- 513 Biaya Cetak, Alat Tulis, Photocopy dan Lichdruk
- 514 Biaya Pos, Telegraph, Telepon, Telex dan Biaya Kirim
- 515 Biaya Perjalanan Dinas
- 516 Biaya langsung Surat kabar, Majalah dan Bulletin
- 517 Biaya Rapat dan Pertemuan
- 518 Biaya Akuntan, Konsultan dan Pengacara
- 519 Biaya Umum Lain-lain
- 611 Biaya Iklan
- 613 Biaya Penghapusan Piutang
- 614 Biaya Contoh (Sampel)
- 615 Biaya Promosi

Sumber : Mulyadi (2017 : 198)

4. Sistem Akuntansi (*Accounting Sistem*)

Biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan manajer maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Setiap tingkatan manajemen merupakan pusat biaya dan akan dibebani dengan biaya yang terjadi didalamnya yang dipisahkan antara biaya terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan. Kode perkiraan diperlukan untuk mengklasifikasi perkiraan-perkiraan baik dalam neraca maupun dalam laporan rugi laba.

Gambar 2.4.

Contoh Format Kode Rekening (Sistem Akuntansi)

- 211 Bagian Persiapan
- 212 Bagian Pengolahan
- 213 Bagian Penyelesaian
- 201 Bagian Perencanaan dan Pengawasan Produksi

221	Bagian reparasi dan Pemeliharaan
222	Bagian Listrik dan Air
223	Bagian Penerimaan
224	Bagian Gudang
311	Bagian Umum
314	Bagian Gaji dan Upah
321	Bagian Asuransi
322	Bagian Kredit
331	Bagian Piutang
332	Bagian Utang
411	Bagian Order Penjualan

Sumber : Mulyadi (2017 : 196)

5. Sistem pelaporan biaya

Setiap manajer akan melaporkan laporan pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Manajer bertanggungjawab atas seluruh aktivitas di dalam kelompoknya serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kebagian yang lebih tinggi di atasnya. Laporan pertanggungjawaban tersebut berisi hasil pelaksanaan kegiatan, berupa anggaran yang direncanakan serta realisasinya sehingga akan terlihat dengan jelas apabila ada penyimpangan dari anggaran yang telah ditetapkan, diidentifikasi dengan pihak yang bertanggungjawab.

Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk tiap-tiap pusat biaya. Setiap awal bulan dibuat rekapitulasi biaya atas dasar total biaya bulan lalu, yang tercantum dalam kartu biaya. Atas ada rekapitulasi biaya disajikan laporan pertanggungjawaban biaya. Isi dari laporan pertanggungjawaban

disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya. Untuk tingkatan manajemen yang terendah disajikan jenis biaya, sedangkan untuk tingkatan manajemen di atasnya disajikan total biaya tiap pusat biaya dibawahnya ditambah dengan biaya-biaya yang terkendalikan dan terjadi dipusat biayanya sendiri.

Gambar 2.5.

Format umum anggaran biaya

Bagian/Departemen/Direktur Laporan Pertanggungjawaban Biaya Bulan		
Kode Jenis Biaya/	Bulan ini	Sampai Dengan Bulan ini
Rek. Pusat Biaya	Realisasi Anggaran	Penyimpangan Realisasi Anggaran
	Penyimpangan	Penyimpangan

Sumber : Mulyadi (2017 : 195)

Dari persyaratan diatas terlihat bahwa konsep akuntansi pertanggungjawaban ini berdasarkan pada klasifikasi pertanggung jawaban manajerial (pusat-pusat pertanggung jawaban), anggaran biaya berfungsi sebagai tolak ukur pelaksanaan pengendalian, biaya diklasifikasikan berdasarkan dapat atau tidaknya dikendalikan oleh seorang pemimpin departemen. Selain itu juga diperlukan struktur organisasi yang jelas menggambarkan wewenang masing-masing bagian yang nantinya mudah dihubungkan dengan tanggung-jawab atas terjadinya biaya-biaya tertentu.

2.3.4. Karakteristik Akuntansi Pertaanggungjawaban

Menurut Mulyadi (2016:186) mengungkapkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban mempunyai 4 karakteristik, yaitu :

1. Adanya indentifikasi pusati pertanggungjawaban.

Akuntansi pertanggung jawaban mengidentifikasi pusat pertanggung jawaban sebagai unit organisasi seperti departemen, keluarga produk, tim kerja, atau individu. Apapun satuan pusat pertanggungjawaban yang dibentuk, Maka sistem akuntansi pertanggungjawaban membedakan tanggung jawabnya kepada individu yang diberi wewenang. Tanggung jawab tersebut dibatasi dalam satuan keuangan (pengendalian biaya).

2. Standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggung jawaban tertentu.

Setelah pusat pertanggung jawaban diidentifikasi dan ditetapkan, maka sistem akuntansi pertanggung jawaban menghendaki ditetapkannya biaya standar yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Biaya standar dan anggaran merupakan ukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran dan ditetapkan dalam anggaran.

3. Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran.

Pelaksanaan anggaran merupakan penggunaan sumber daya oleh manajer pusat pertanggungjawaban dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam anggaran. Penggunaan sumber daya ini diukur dengan informasi akuntansi pertanggung jawaban yang mencerminkan ukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dalam Mencapai sasaran anggaran.

4. Manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi.

Sistem penghargaan atau hukuman dirancau untuk memacu para manajer dalam mengelola biaya dalam mencapai target biaya yang dicantumkan dalam anggaran.

2.3.5. Tujuan dan Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban

Adapun tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban adalah:

1. Untuk memotivasi kerja para manajer

Melalui peranan akuntansi pertanggung jawaban diharapkan para manajer akan lebih termotivasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu berupa anggaran dasar bagi setiap pusat pertanggung jawaban, dimana terhadap pusat pertanggung jawaban yang berpartisipasi umumnya diberikan insentif antara lain berupa bonus, kenaikan gaji, promosi jabatan, dan sebagainya.

2. Untuk mengevaluasi prestasi kerja para manajer

Melalui sistem akuntansi pertanggungjawaban standar prestasi kerja para manajer dapat dibentuk secara layak sesuai dengan jenis, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing.

3. Untuk pengendalian biaya

Untuk memperoleh jaminan prestasi atas hasil, baik barang maupun jasa yang sebesar-besarnya dengan kualitas yang dikehendaki, ataupun dengan kata lain, pengendalian biaya ditujukan untuk memperoleh

hasil yang sebaikbaiknya dengan biaya yang seminimal mungkin.

Pengendalian biaya ditempuh dengan cara:

- 1) Dengan menetapkan standar atau tolak ukur perbandingan,
- 2) Dengan mencatat prestasi pelaksanaan yang sebenarnya,
- 3) Dengan perbandingan biaya yang ditetapkan tatkala pekerjaan masih dilaksanakan.

Sedangkan manfaat dari akuntansi pertanggungjawaban adalah:

1. Melalui akuntansi pertanggungjawaban organisasi akan lebih mudah dikendalikan karena organisasi dibagi menjadi unit-unit terkecil.
2. Dapat diambil keputusan yang lebih baik karena dilakukan langsung oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang mengetahui jumlah rupiah dan unitnya.
3. Tingkat kepuasan kerja dan moral lebih tinggi, hal ini disebabkan para manajer aktif berpartisipasi dalam proses manajemen.
4. Para manajer di tiap unit organisasi memiliki kesempatan untuk memperoleh keahlian manajerial dan motivasi untuk bertindak dengan cara yang menguntungkan perusahaan.

2.3.6. Pusat Pertanggungjawaban

a. Defenisi Pusat Pertanggungjawaban

Menurut Salman dan Farid (2017:111) pusat pertanggungjawaban ialah setiap unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab. Suatu pusat pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengolah masukan dan keluaran. Masukan suatu pusat

pertanggungjawaban yang diukur dalam satuan uang disebut dengan biaya, sedangkan keluaran suatu pusat pertanggungjawaban yang dinyatakan dalam satuan uang disebut pendapatan .

Dalam suatu pusat pertanggungjawaban juga terdapat dua unsur utama yaitu unit organisasi dan manajer yang memimpinya. Selain itu pusat pertanggungjawaban juga melakukan tiga kegiatan yaitu:

- 1) Penggunaan input atau masukan.
- 2) Melakukan pengolahan terhadap input tersebut.
- 3) Menghasilkan output atau keluaran sebagai hasil dari proses olahan.

Apabila suatu perusahaan ingin menetapkan suatu organisasi sebagai suatu pusat pertanggungjawaban, maka ada beberapa kriteria yang harus terlebih dahulu dipenuhi yaitu:

- 1) Adanya pembagian tugas, tanggungjawab yang jelas diantara pusat-pusat pertanggungjawaban maupun dalam pusat pertanggungjawaban itu sendiri.
- 2) Adanya pelimpahan wewenang yang jelas kepada pimpinan pusat pertanggungjawaban.
- 3) Manajer atau pimpinan pusat pertanggungjawaban harus mampu mengawasi biaya-biaya yang terjadi dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinya.

b. Jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban

Adapun jenis-jenis pusat pertanggungjawaban menurut Mulyadi (2017) :

1. Pusat Biaya (*Cost Center*)

Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diukur prestasinya atas dasar biayanya (nilai masukan). Setiap pusat pertanggungjawaban mengkonsumsi masukan dan menghasilkan keluaran. Dalam pusat biaya, keluarannya tidak dapat atau tidak perlu diukur dalam wujud pendapatan.

2. Pusat Pendapatan (*Revenue Center*)

Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan pusat pertanggungjawaban tersebut. Manajer pusat pendapatan diukur kinerjanya dari pendapatan yang diperoleh pusat pertanggungjawaban dan tidak dimintai pertanggungjawaban mengenai masukan, karena tidak akan mempengaruhi pemakainya masukan tersebut.

3. Pusat Laba (*Profit Center*)

Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pusat pertanggungjawaban tersebut. Manajer pusat laba diukur kinerjanya dari selisih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

4. Pusat Investasi (*Investmen Center*)

Pusat investasi adalah pusat laba yang manajernya diukur prestasinya dengan menghubungkan laba yang diperoleh pusat

pertanggungjawaban tersebut dengan investasi yang bersangkutan. Ukuran manajer pusat investasi dapat berupa ratio antara laba dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut.

Adapun tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggungjawaban yaitu:

1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajerdan unit organisasi yang dipimpinnya.
2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi.
3. Memfasilitasi terbentuknya goal congruence.
4. Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensisehingga mengurangi beban tugas manajer pusat.
5. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan.
6. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien.
7. Sebagai alat pengendalian anggaran.

2.3.7. Pengendalian Biaya

Dalam menjalankan bisnis, suatu perusahaan tidak hanya memikirkan bagaimana strategi bisnis serta pemasarannya tetapi juga harus memikirkan bagaimana cara mengelola dan mengendalikan biaya-biaya. Biaya-biaya operasional perusahaan mengalami kebocoran apalagi jika kebocorannya kecil maka perusahaan tersebut dalam kondisi kurang sehat walaupun dari sisi pendapatan terus meningkat.

Menurut Mulyadi (2017) pengendalian biaya adalah suatu metode berupa sistem biaya standard yang memfokuskan pengendalian kos produk, dan metode sistem akuntansi pertanggungjawaban dalam total biaya penuh produk dan biaya bahan dan biaya tenaga kerja

Jadi pengendalian biaya dapat disimpulkan menjadi suatu kegiatan untuk memantau serta mengevaluasi hasil antara realisasi dengan anggaran yang terjadi di perusahaan atau bisa juga disebut dengan upaya pengendalian biaya perusahaan yang meliputi biaya operasional, perencanaan, pelaksanaan, dan lain-lain. Apabila rencana dilakukan dengan baik, maka akan memudahkan manajemen dalam melakukan pengendalian biaya

2.3.8. Sistem Pelaporan Akuntansi Pertanggungjawaban Biaya

Salah satu unsur yang terpenting dari akuntansi pertanggungjawaban adalah adanya laporan dari masing-masing unit, atau masing-masing divisi kepada atasannya. Pelaporan ini sangat penting, karena dari sinilah dapat dinilai kinerja dari masing-masing unit atau departemen, apakah mereka sudah bekerja sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Sesuai dengan laporan yang diterima maka akan dievaluasi, dinilai dan diukur hasil pekerjaan tersebut. Bila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan akan dapat diambil tindakan koreksi dan tindakan pengendalian terhadap kesalahan yang akan terjadi.

1. Dasar-dasar yang Melandasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Biaya Laporan pertanggungjawaban biaya ini

dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap manajer berbagai jenjang organisasi. Laporan ini disusun dengan dasar-dasar berikut ini:

- a. Jenjang terbawah yang terdiri diberi laporan adalah tingkat manajer bagian.
- b. Manajer jenjang terbawah diberi laporan pertanggungjawaban biaya yang berisi rincian realisasi biaya dibandingkan dengan anggaran biaya yang disusunnya.
- c. Manajer jenjang di atasnya diberi laporan mengenai biaya pusat pertanggungjawaban sendiri dan ringkasan realisasi biaya yang dikeluarkan oleh manajer-manajer yang berada dibawah wewenangnya, yang disajikan dalam bentuk perbandingan anggaran biaya yang disusun oleh masing-masing manajer yang bersangkutan.
- d. Semakin keatas, laporan pertanggungjawaban biaya disajikan semakin ringkas.

2. Format Laporan Pertanggungjawaban biaya

Laporan pertanggungjawaban biaya berisi informasi berikut ini:

- a. Nomor kode rekening biaya
- b. Jenis biaya atau pusat pertanggungjawaban
- c. Realisasi biaya bulan ini
- d. Anggaran biaya bulan ini
- e. Penyimpangan biaya bulan ini
- f. Realisasi biaya sampai dengan bulan ini

- g. Anggaran biaya sampai dengan bulan ini
- h. Penyimpangan biaya sampai dengan bulan ini.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban biaya terdiri dari berbagai jenis uraian seperti jenis biaya atau pusat pertanggungjawaban, realisasi dan anggaran biaya dan lain-lain.

3. Sistem Pelaporan Biaya Kepada Manajer Yang Bertanggungjawab

Jenis laporan pertanggungjawaban biaya digolongkan menjadi tiga kelompok sesuai dengan jenjang organisasi berikut ini:

- a. Laporan pertanggungjawaban biaya manajer bagian. Laporan ini disajikan untuk para manajer bagian.
- b. Laporan pertanggungjawaban biaya manajer departemen. Laporan ini disajikan untuk para manajer departemen.
- c. Laporan pertanggungjawaban biaya direksi. Laporan ini disajikan kepada direktur utama, direktur produksi, dan direktur pemasaran

Sesuai dengan tingkatan-tingkatan manajemen yang terdapat didalam struktur organisasi, maka sifat frekuensi dari laporan pertanggungjawaban pun akan berbeda-beda. Frekuensi pelaporan juga tergantung dari kebutuhan dari informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan. Apabila situasinya sangat kritis atau tidak memuaskan maka laporan harus lebih sering dibuat dibanding dengan keadaan

normal. Selain itu tingkatan di dalam struktur organisasi juga merupakan salah satu kriteria atau faktor di dalam frekuensi laporan.

Frekuensi laporan, semakin tinggi jenjang organisasi maka laporan yang diberikan akan lebih bersifat ringkas, langsung kepada objeknya, dan tidak sesering dari laporan yang dibawahnya. Semakin rendah tingkatnya maka laporannya juga akan lebih sering dan lebih lengkap dan makin banyak penjelasan-penjelasan yang diberikan. Contohnya seorang manajer unit atau eksekutif atas mungkin memberikan laporannya kepada atasan sekali atau dua kali didalam seminggu. Sementara eksekutif bawahan seperti mandor, mungkin memerlukan laporan per setengah hari atau per hari bahkan yang ada dibawah mandor bisa memerlukan laporan per jam.

Agar laporan yang disampaikan dapat memberikan hasil yang baik, maka sebaiknya laporan-laporan tersebut harus tepat waktu, jelas, dibuat dalam bahasa dan istilah yang mudah dimengerti, disajikan dalam bentuk yang mudah untuk dipahami dan harus akurat. Semua informasi baik yang menyangkut akuntansi maupun non akuntansi diringkaskan, dianalisa dan dilaporkan pada atasan yang memberikan tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk memberitahukkan tentang apa yang terjadi dalam perusahaan. Jadi laporan merupakan alat yang penting bukan hanya sebagai alat pertanggungjawaban bagi orang yang disertai wewenang dan tanggungjawab, tetapi juga penting bagi penerapan pengendalian.

Dalam akuntansi pertanggungjawaban seharusnya bagian akuntansi biaya setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban biaya untuk tiap-tiap pusat biaya. Setiap awal bulan dibuat rekapitulasi biaya atas dasar daya total biaya bulan lalu, yang tercantum dalam kartu biaya tersebut kemudian disajikan laporan pertanggungjawaban biaya. Isi laporan pertanggungjawaban biaya disesuaikan dengan tingkat manajemen yang akan menerimanya. Untuk tingkat manajemen yang terendah disajikan jenis biaya (menurut objek pengeluaran) sedangkan untuk tingkat manajemen di atasnya disajikan total biaya tiap-tiap pusat biaya yang dibawahnya, ditambah dengan biaya-biaya yang terkendalikan dan terjadi di pusat biayanya sendiri.

2.3.9. Hubungan Pengendalian Biaya dengan Akuntansi Pertanggungjawaban

Pengendalian biaya tidak dapat terlepas dari sistem pengendalian manajemen yang berlaku. Dengan memahami sistem pengendalian yang berlaku, anggota organisasi dapat melaksanakan apa yang dikehendaki oleh manajemen.

Proses pengendalian manajemen merupakan seperangkat tindakan yang dilaksanakan oleh manajer atas dasar informasi yang mereka terima. Secara garis besar, proses pengendalian manajemen meliputi dua kegiatan yang saling berkaitan yaitu dengan perencanaan dan pengendalian. Kedua aktivitas ini berlaku untuk setiap tindakan manajemen dalam organisasi perusahaan khususnya untuk level manajemen menengah ke atas.

Seorang manajer senantiasa berusaha menyusun rencana atas tindakan yang akan dilakukan misalnya dalam bentuk standar, budget, taksiran atau program. Untuk menentukan apakah rencana tersebut dapat berjalan dengan baik dan sampai pada tujuan yang diinginkan, maka perlu diadakan pengawasan atas pelaksanaannya.

Tahap-tahap pengendalian biaya menurut Mulyadi (2017) dapat dilakukan dengan cara :

1. Perencanaan
2. Operasi dan pengukuran
3. Pelaporan dan analisa

Ketigat tahap di atas merupakan suatu rangkaian (siklus) tertutup, dimana setiap tahap mengawali tahap berikutnya dan akhirnya menghasilkan suatu sistem pengendalian manajemen yang sistematis. Pengendalian biaya pada sistem akuntansi pertanggungjawaban dengan memberi peran kepada manajer pusat pertanggungjawaban berupa wewenang dan tanggung jawab terhadap unit yang dipimpinnya.

Menurut Mulyadi (2017) tahap pengendalian biaya pada sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan, dengan menerapkan standar perbandingan melalui sistem anggaran dan standar.
2. Tahap operasi dan pengukuran dengan mencatat realisasi pelaksanaan.

3. Tahap pelaporan dan analisa, dengan membandingkan realisasi pelaksanaan biaya dengan anggaran yang meliputi :
 - a. Menetapkan perbedaan antara realisasi dengan anggaran
 - b. Mengevaluasi sebab-sebab terjadinya perbedaan
 - c. Mengambil tindakan untuk mengendalikan realisasi biaya yang tidak memuaskan agar sesuai dengan anggaran/standar yang telah ditetapkan.

Pengendalian harus segera dilaksanakan sebelum berkembang menjadi kerugian besar, pengendalian juga merupakan langkah penting agar setiap penyimpangan yang terjadi di analisa secepatnya dan dinyatakan sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab dengan biaya tersebut. Dengan demikian pengendalian, kecepatan dan metode akan diambil dan juga pada efektifitas pengendalian biaya itu sendiri.

Pemisahan fungsi-fungsi dalam suatu perusahaan merupakan hal yang hakiki, oleh karena itu seorang manajer atau top manajer mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya yang penting dalam perusahaan. Seperti halnya manajemen dalam berbagai organisasi, setiap manajer mempunyai tugastugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Manajer dapat diklasifikasikan menurut tingkatan mereka dalam organisasi yaitu manajemen tingkat rendah, menengah dan tinggi serta menurut kegiatan-kegiatan dalam organisasi dan bertanggung jawab atas penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah

dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif untuk merealisasikan kegiatan perusahaan sangat diperlukan.

Akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat kontrol yang dapat dijadikan acuan atau pertimbangan oleh setiap perusahaan dalam melaksanakan aktifitasnya dalam pengumpulan laporan biaya dan pendapatan atau penerimaan perusahaan yang merupakan suatu elemen dari struktur pengendalian manajemen. Dalam suatu organisasi perlu adanya pembagian pusat pertanggungjawaban agar pusat-pusat pertanggungjawaban dapat diukur prestasinya dan berusaha sebagai satu kesatuan yang terpadu dalam mencapai tujuan perusahaan. Serta akuntansi pertanggungjawaban merupakan hubungan antara manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan realisasinya. Penting bagi setiap manajer untuk merencanakan pendapatan atau biaya yang akan dikeluarkan sehingga dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban akan dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan di masa yang akan datang.

2.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang	Judul	Hasil
1	Rabin P. Ramadhan, Jullie Sondakh, Syermi Mintalangi (2021)	Evaluasi Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PT Delta Pasific Indotuna Bitung	terdapat unsur yang belum sesuai dengan syarat-syarat dan karakteristik dari akuntansi pertanggungjawaban yaitu unsur struktur organisasi, pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali, serta laporan realisasi anggaran biaya. Pengendalian biaya yang dilakukan oleh PT. Delta Pasific Indotuna belum sepenuhnya efisien.
2	Ni Kadek Herlinda Ayu Wandari, Edy sujana (2021)	Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada RSUD Kab Buleleng	bahwa RSUD Kabupaten Buleleng, Bali sudah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya dengan baik dan sesuai dengan aturan. Perusahaan ini telah memenuhi syarat dan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban. Hanya saja pada sistem pelaporan, format laporan pertanggungjawaban rumahsakit berbeda dengan teori.
3	Erika Sharon, Syermi S. E. Mintalangi (2021)	Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara.	Penerapan akuntansi pertanggungjawaban di PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara telah memadai. Hal ini dikarenakan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara telah memenuhi kelima syarat akuntansi pertanggungjawaban dan karakteristik akuntansi pertanggungjawaban dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Penulis memilih objek penelitian ini pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Marihat Dalu-dalu. Perusahaan ini berada di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Penulis tertarik ingin melakukan penelitian di perusahaan ini untuk melihat apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan ini sudah memadai sebagai alat pengendali biaya pada perusahaan PPKS Marihat Dalu-dalu ini.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dimana landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Menurut Sugiyono (2018:16) metode penelitian kualitatif disebut juga metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat semi (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data bersifat kuantitatif. Data kuantitatif yang dimaksud disini berupa laporan realisasi anggaran biaya yang memuat nilai yang dianggarkan dengan nilai yang terealisasikan.

3.3.2. Sumber data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder.

1. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2018:296) data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data yang kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder berupa bentuk laporan realisasi anggaran yang sudah arsip oleh masing-masing departemen.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:296) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan dokumentasi yang ada pada perusahaan.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Dalam penelitian ini menjabarkan seluruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PPKS Marihat Dalu-dalu, mulai dari syarat-syarat akuntansi pertanggungjawaban, karakteristik akuntansi pertanggungjawaban, serta penyajian biaya pada laporan pertanggungjawaban. Proses analisis dalam penelitian adalah pengumpulan data-data informasi yang berkaitan dengan informasi penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Proses tersebut dimulai melalui wawancara dengan informan serta dokumen yang menjadi pendukung

dalam penelitian, sehingga akan memuat rangkaian proses penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PPKS Marihat Dalu-dalu, yang kemudian akan dibahas pada bab IV untuk diambil kesimpulan bahwa evaluasi penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Marihat Dalu-dalu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.6. Jadwal Penelitian

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022						
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
Pengajuan Judul	■									
Observasi Awal		■								
Seminar Judul		■								
Pengumpulan Data			■	■						
Penyusunan Proposal					■	■	■	■		
Seminar Proposal								■		
Penelitian									■	
Sidang Skripsi										■